

PEMAHAMAN KEBHINNEKAAN PESERTA DIDIK DI MADRASAH ALIYAH DI KOTA SORONG, PAPUA BARAT

*Muhammad Rais**

Balai Peneitian dan Pengembangan Agama Makassar Jl. AP.Pettarani No. 72 Makassar Email: raispuslit2@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Perspektif,
kebhinnekaan,
peserta didik,
Madrasah Aliyah,
Sorong*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman kebhinnekaan peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kota Sorong, Papua Barat. Dalam upaya pengumpulan dan analisis data, riset ini menggunakan metode kualitatif. Selain peneliti sebagai inteumen utama, pengumpulan data juga memanfaatkan wawancara mendalam, observasi, FGD, dan studi dokumen. Penelitian ini menemukan beberapa hal yang berkenaan dengan perspektif informan, relevansinya dengan elemen kebudayaan yang mereka pahami, alami, yang akhirnya membentuk wawasan dalam domain kognitif mereka. Kalangan informan memahami betul keberagaman budaya yang melingkupi mereka, baik keberagaman agama, ras, suku bangsa, dan bahkan keberagaman aliran ataupun kelompok keagamaan. Setidaknya, ada beberapa sumber informasi, tersebut;meliputi: pembelajaran di madrasah melalui beberapa mata pelajaran yang memuat konten kebhinnekaan, lingkungan keluarga, dan secara makro lingkungan masyarakat. Namun, yang unik adalah pergeseran sarana informasi yang menjadi sumber rujukan/bahan peserta didik dalam memperoleh data dan informasi, termasuk keragaman budayan, yang sebelum didominasi sumber-sumber konvensional, seperti lembaga Pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Kini, peserta didik lebih dominan merujuk pada media-media arus utama saat ini, misalnya media sosial, dengan beberapa variannya, terdiri dari Whats up, Instagram, Faceboook, dan sebagainya.

ABSTRACT

Keywords:
*Perspective, cultural
diversity, student,
Islamic High
School, Sorong*

This study aims to describe the understanding of diversity of students in Madrasah Aliyah in Sorong City, West Papua. In an effort to collect and analyze data, this research uses qualitative methods. In addition to researchers as the main instrument, data collection also utilizes in-depth interviews, observations, FGDs, and document studies. This research found several things related to the perspective of the informants, their relevance to the cultural elements that they understood, naturally, which eventually formed insights in their cognitive domain. The informants understand very well the cultural diversity that surrounds them, both the diversity of religions, races, ethnic groups, and even the diversity of sects or religious groups. At least, there are several sources of information, including: learning in madrasas through several subjects that contain diversity, family environment, and macro community environment. However, what is unique is the shift in information facilities that are sources of reference / material for students in obtaining data and information, including cultural diversity, which were before dominated by conventional sources, such as educational institutions, families, and communities. Now, students are more dominant in referring to the mainstream media today, for example social media, with some variants, consisting of Whats up, Instagram, Facebook, and so on.

PENDAHULUAN

“Miniatur Nusantara”, demikian klaim warga Kota Sorong, yang dengan bangganya menuturkan bangunan mozaik

elemen kebudayaan yang begitu kaya nan beragam yang kini melingkupi mereka, maka pendapat antropolog Max Planc

Institute, Martin Ramstedt (lipi.go.id, 20/3/2020) terkonfirmasi di sini, bahwa Indonesia merupakan laboratorium kemajemukan. Klaim itu akan terkonfirmasi jika kita sejenak meluangkan waktu menyusuri tiap sudut dan ruang publik kota yang kini beranjak menuju kota metropolitan di ujung pulau Kepala Burung ini. Nyaris semua identitas Nusantara ada di tempat ini, mulai dari penduduk lokal dengan keragaman sukunya, migran dari Jawa, Bugis, Makassar, Minang, Manado, Batak, Tator, Maluku, Sunda dan seterusnya. Migrasi penduduk ke Kota Sorong yang berasal dari latar budaya yang beragam, semakin mendorong terbentuknya keragaman secara multikultural ini, hal senada dengan asumsi yang dikonstruksi Jackson, "contributing to growing multicultural diversity (2014: 16).

Selain keragaman identitas etnis (suku bangsa), kekayaan dari sisi identitas keagamaan pun ikut memoles keindahan kota ini, penduduk lokal yang dominan menganut agama Kristen, dan kini berdampingan penduduk lokal yang menganut agama Islam-misalnya etnis Kokoda yang merupakan penduduk Sorong Selatan yang kemudian bermigrasi ke wilayah kota. Keragaman identitas keagamaan ini semakin diperkaya dengan kehadiran para migran dari berbagai daerah dengan anutan agama yang berbeda-beda, termasuk umat Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Tak dapat disangkal bahwa masing-masing agama terdiferensiasi lagi ke dalam beberapa aliran, golongan dan denominasi.

Dalam konteks keragaman identitas budaya di Kota Sorong, hingga kini masih terkelola dengan cukup baik, bahkan sangat baik, berkat concern pemerintah daerah, tokoh masyarakat/agama, FKUB, dan stakeholders lainnya, dan tentunya tak lepas dari kesadaran multikultural ataupun kebhinekaan masyarakat secara makro. Hal itu terkonfirmasi melalui hasil survey indeks kerukunan secara nasional yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang menempatkan

Provinsi Barat diurutan teratas dibanding provinsi lainnya, dengan nilai skor 80 poin.

Capaian tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat kota Sorong, meskipun demikian, riak-riak kecil yang kerap kali muncul dalam interaksi social tak bisa dinafikan, terutama imbas dari pengaruh yang datang dari luar, misalnya merebaknya kerusuhan di dalam kota Sorong, beberapa bulan yang lalu sebagai resonansi atas kemarahan warga Papua atas tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua yang dilakukan salah seorang oknum di Kota Surabaya, sebagian warga Kota Sorong melakukan protes dan turun ke jalan hingga merusak beberapa fasilitas, beruntung aksi tersebut dengan cepat dapat diatasi.

Masyarakat Indonesia yang majemuk, plural society, begitu J. S. Furnivaal (2010: 446) menyebutnya, Netherland Indie, yang kini bernama Indonesia itu dihuni masyarakat yang heterogen yang terdiri dari dua atau lebih elemen-elemen ataupun tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tidak berbaur, termasuk dalam satu satuan politik (in one political unit). Dalam kerangka optimalisasi pengelolaan keragaman identitas kultural yang dalam platform Bhinneka tunggal Ika, Indonesia yang terdiri dari 17.500, yang dihuni populasi dengan beragam Bahasa yang mencapai 365 bahasa, maka penguatan wawasan kebhinnekaan bagi segenap warga bangsa menjadi suatu keniscayaan. Tak terkecuali generasi muda, dan secara spesifik peserta didik yang dalam putaran waktu akan menerima estafet kepemimpinan bangsa.

Ikhtiar ini semakin krusial di tengah pergeseran pemahaman agama sebagian pendidik dan peserta didik ke arah ideologi ultra-kanan, dengan kecenderungan perilaku intoleran terhadap warga bangsa lainnya yang-kebetulan-berbeda pilihan identitas. Sikap intoleran dan ekstrem keagamaan ini menurut Pakar Pendidikan, Abduhzen (Kompas, 02/5/2015) sering kali lahir dari pemahaman agama yang berorientasi negatif yang tertanam melalui

pengajaran, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Gejala ini terkonfirmasi melalui beberapa hasil survey yang dilakukan beberapa lembaga riset yang otoritatif, seperti Setara Institute, Wahid Institute, termasuk penelitian yang secara berkala dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Survei toleransi pelajar Indonesia yang dilakukan oleh Setara Institute pada 2016 menyimpulkan bahwa 35,7% siswa memiliki paham intoleran yang baru dalam tataran pemikiran, 2,4% persen sudah menunjukkan sikap intoleran dalam tindakan dan perkataan dan 0,3% berpotensi menjadi teroris. Survei ini dilakukan atas 760 responden yang sedang menempuh pendidikan SMA Negeri di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Hal ini paralel dengan hasil survey yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta 2018, yang menemukan indikasi adanya 53,6% guru memiliki pandangan yang intoleran. Dapat dibayangkan, betapa sulitnya menghadirkan wawasan kebhinnekaan serta multikultural dalam domain pendidikan ketika guru sendiri memiliki pemahaman yang tidak toleran terhadap perbedaan identitas keagamaan.

Rumusan Masalah

Mengacu pada deskripsi realitas sosial tadi, tengarai khususnya masih mengemukanya masalah intoleransi di kalangan dunia pendidikan, khususnya peserta didik sebagai manifestasi belum optimalnya penanaman nilai-nilai kebhinnekaan selama ini, maka masalah penelitian yang pentingnya dijawab melalui riset adalah Bagaimana pemahaman kebhinnekaan peserta didik Madrasah Aliyah di Kota Sorong, Papua Barat.

Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

Penelitian ini secara spesifik diorientasikan untuk mendeskripsikan secara kualitatif pemahaman atau persepsi kebhinnekaan peserta didik Madrasah Aliyah di Kota Sorong, Papua Barat.

Berkenaan dengan wawasan kebhinnekaan dalam konteks keragaman suku, agama, ras, dan afiliasi aliran keagamaan. Termasuk sumber-sumber pembelajaran yang akhirnya membentuk pola pemahaman kebhinnekaan tersebut, baik sumber pemahaman yang sifatnya konvensional; sekolah/madasah, keluarga, maupun lingkungan sosial. Hasil penelitian wawasan kebhinnekaan peserta didik ini diharapkan menjadi data dan informasi yang signifikan dijadikan sebagai pijakan pengambilan kebijakan dalam upaya transformatif kalangan pengambil kebijakan khususnya di lingkungan Direktorat Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah dalam menata madrasah terutama pola pembelajaran serta penguatan budaya madrasah yang lebih multikultural maupun moderat (tawassuth). Secara teoritis dan konseptual, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan penelitian-penelitian yang serupa ke depan, sehingga penelitian-penelitian tentang kebhinnekaan lebih memperkaya khazanah pengetahuan.

Kajian Pustaka Persepsi

Konsep pemahaman dalam penelitian ini disejajarkan dengan persepsi yang kerap kali menjadi konsep kunci dalam penelitian sosial maupun psikologi sosial. Persepsi sebagai bentuk respon serta reaksi pada tataran kognitif merupakan bagian dari ranah psikologis, sementara komponen sikap adalah bentuk respon aktual yang bersifat evaluatif; seperangkat mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan, serta ikut menentukan kecenderungan perilaku terhadap manusia ataupun obyek yang sedang dihadapi (Azwar, 2009: 2).

Namun, seorang filosof Jerman, Immanuel Kant mengartikulasikan konsep persepsi yang dimaknai setara dalam penelitian ini sebagai respon evaluatif komponen kognitif, hal itu lebih sekedar penglihatan. Pemahaman (persepsi)

manusia, secara kongkrit dikemukakan Singer dalam (Larry A. Samovar, et.al.) bahwa persepsi yang diterjemahkan dalam penelitian ini dengan pemahaman, bahwa kita mengalami sesuatu di dunia ini bukan sebagaimana adanya-namun, hanya ketika dunia ini datang kepada kita melalui alat indera kita. Dan hal ini melibatkan Anda secara kognitif mengolah proses tersebut.

Konsep persepsi diartikulasi oleh sebagian pakar sebagai cognitive component (komponen kognitif), yang terdiri dari pemahaman, pemikiran, seseorang obyek tertentu, seperti keyakinan, pengetahuan, maupun fakta. Persepsi Anda mengartikan pengaruh eksternal dengan mengizinkan Anda untuk menafsirkannya, mengelompokannya, serta mengatur stimulus yang Anda pilih untuk dimonitor (Samavor, et. al. : 223).

Mengacu pada preposisi Psikolog Sosial, Shelly E. Taylor, et.al (2009: 38), bahwa pemahaman atau perfektif kebhinnekaan kultural seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma sosial, dan juga peran sosial. Identitas budaya yang berbeda dalam penekanan relatif yang diberikan pada individu maupun kolektif. Sehingga persepsi seseorang yang dimaknai sebagai pemahaman dalam penelitian ini, termasuk persepsi kebhinnekaan sebagai manifestasi kesan terhadap orang lain.

Shelly (2009: 41) kemudian mengonstruksi beberapa prinsip yang membentuk pemahaman/persepsi seseorang sebagai berikut: 1) orang membentuk kesan tentang orang lain dengan cepat berdasarkan informasi minimal lantas menyebut karakteristik umum dari orang lain; 2) orang memberi perhatian khusus pada ciri paling menonjol dari seseorang, bukan memerhatikan seluruh ciri orang tersebut. Kita memerhatikan kualitas yang membuat orang berbeda atau aneh; 3) Dalam memproses informasi tentang orang lain, kita kerap memberi makna koheren pada perilaku mereka. Kita, sampai tingkat

tertentu, menggunakan konteks perilaku orang lain untuk menyimpulkan makna perilaku mereka, bukan menafsirkan perilaku secara terpisah.

Dalam kerangka untuk menilai tingkat persepsi atau pemahaman peserta didik terkait dengan kebhinnekaan terdapat beberapa teori yang lazim digunakan, diantaranya Benjamin Bloom-meskipun kini banyak dikritik-dalam bukunya *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals* (1956: 7), yang membagi domain taksonomi dalam tiga bagian utama (a complete taxonomy in three major parts), yakni domain kognitif; domain afektif, dan domain psikomotorik. Khusus berkaitan dengan pemahaman (konsep) Bloom (1956, 92-95) mengklasifikasikan dalam tiga tingkatan kategori sebagai berikut: penerjemahan; penafsiran; dan ekstrapolasi.

Penelitian ini lebih fokus pada domain kognitif (pemahaman/persepsi) peserta didik, komponen yang merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu (Azwar, 2009: 24), maka tesis Kenneth D. Moore (2014)-yang juga mengacu pada Bloom-digunakan untuk melihat tingkat pemahaman kebhinnekaan peserta didik di Kota Sorong. Setidaknya, jika kajiannya fokus pada ranah kognitif yang lebih concern pada kemampuan berpikir serta bernalar peserta didik (concerned with students thinking and reasoning abilities), demikian kata Moore. Ranah ini terdiri dari enam tahapan, meliputi: knowledge; comprehension; application; analysis; synthesis; evaluation.

Rosenberg dan Hoveland (Azwar, 2009: 20) membuat perbedaan antara respon ketiga komponen tadi, bahwa jika kategori responnya ranah kognitif maka tipe respon verbalnya dalam bentuk pernyataan keyakinan mengenai obyek sikap tersebut, dan respon non verbalnya dalam bentuk reaksi perseptual terhadap obyek, respon ini berbeda dengan respon terhadap kategori afektif dan konatif.

Level	Student Action
Knowledge	identify, define, list, match, state, name, label, describe, select
Comprehension	translate, convert, generalize, paraphrase, rewrite, summarize, distinguish, infer, alter, explain
Application	use, operate, produce, change, solve, show, compute, prepare, determine
Analysis	discriminate, select, distinguish, separate, subdivide, identify, break down, analyze, compare
Synthesis	design, plan, compile, compose, organize, conclude, arrange, construct, devise
Evaluation	appraise, compare, justify, criticize, explain, interpret, conclude, summarize, evaluate

Kebhinnekaan

Dalam konteks konfigurasi social di Indonesia, konsep kebhinnekaan menjadi suatu keniscayaan untuk dikaji lebih dalam berkenaan dengan kemajemukan budaya tersebut, dalam yang lebih urgen adalah merawat kemajemukan tersebut dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Dalam kajian semantik konsep kebhinnekaan telah banyak dibahas, diantaranya Budi Hardiman yang mengklaim bahwa semboyan Bhinneka Tungga Ika sebagai penanda bahwa Indonesia merupakan Negara multikultural, masyarakat di Indonesia sebagai masyarakat yang polietnis (2002). Konsep multibudaya tersebut dimaknai Kymlicka sebagai berbagai bentuk pluralisme budaya yang masing-masing berbeda (2002).

Dan, dalam konteks keindonesiaan, kebhinnekaan atau keragaman elemen budaya, ras, agama, bahasa, adat, etnis dan sebagainya, ternyata telah ada sejak awal sejarah Indonesia, dan seiring dengan dinamika social-politik, masalah keragaman tersebut mengambil bentuk yang berbeda-beda (Baqir, 2011: 12). Irwan Abdullah menggugah kesadaran akan pentingnya pembudayaan konsepsi Bhinneka Tungga Ika pada generasi muda sebagai fondasi bangsa dan Negara. Penanaman dan pembudayaan menjadi jalan bagi peningkatan kualitas serta orientasi sumber daya manusia terutama melalui tiga tahapan sebagai berikut: eksternalisasi nilai-nilai; obyektivasi nilai-nilai; dan dan institusionalisasi nilai

tersebut (2010: 44). Proses ini penting dilakukan, lanjut Abdullah, di tengah pengaruh globalisasi yang menyebabkan bergesernya pranata social, seiring dengan mulai diabaikannya konsepsi Bhinneka Tungga Ika.

Kenneth D. Moore dalam bukunya *Effective Instructional Strategies* (2014) yang membahas pentingnya pembelajaran spesifik dalam masyarakat multikultural, yang dianggap mengalami pencapaian beberapa dekade terakhir, pendidik berupaya kenumbuhkan kepekaan budaya dalam kerangka mengeliminir rasisme, prasangka etnis, di samping memberikan layanan secara adil kepada semua peserta didik dengan latar belakang budaya yang berbeda (providing equal educational opportunities for all students). Dan, bagi Moore, semuanya kembali terpulang pada pendidik sebagai aktor kunci dalam membuka ruang melting pot di dalam masyarakat saat ini

Pluralisme dan atau Multikulturalisme Kewargaan

Beberapa decade terakhir menurut Robert W. Hefner telah mengemuka minat baru berkenaan dengan demokrasi dan kebhinnekaan/pluralisme budaya. Yang ditengarai Will kymlicka (2002) sebagai gejala menguatnya kewargaan multikultural (multicultural citizenship). Pertanyaan yang kemudian mengemuka menurut Robert W. Hefner dalam bukunya *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*

(2001) adalah bagaimana mencapai kewarganaan yang inklusif dalam masyarakat yang sangat majemuk secara kultural yang menjadi masalah universal.

Multikulturalisme yang tidak secara kaku dibedakan beberapa pakar di bidang ini, termasuk pakar kontemporer ini; Bikhu Parekh dalam bukunya *Rethinking Multiculturalism* (2000), Abdulaziz Sachedina dalam bukunya *The Islamic Roots of Democratic Pluralism* (2001) lebih memaknai konsep pluralisme sebagai bagian dari slogan dari tatanan dunia baru yang korelasinya terkait dengan keragaman budaya, sistem keyakinan, dan juga tata nilai yang sarat dengan inspirasi akan aksesi manusia yang selalu berupaya untuk menghindari konflik yang ditakutkan tak tertangani. Sebab realitas faktualnya, lanjut Sachedina, konflik yang mengemuka selama ini lazimnya berbasis pada keragaman budaya yang kerap kali menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan. Di titik inilah pendidikan pluralisme kewarganaan yang sangat penting di tengah masyarakat yang sangat majemuk, baik plural secara budaya apalagi agama yang kini perlu dirancang untuk memperkuat elemen budaya yang beragam tersebut (Burtonwood, 2006: 1).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus memanfaatkan metode kualitatif untuk menggali data berkenaan dengan pemahaman kebhinnekaan peserta didik Madrasah Aliyah di Kota Sorong, Papua Barat, sebagai bagian dari respon kognitif mereka, meminjam istilah Antropolog Kognitif, Ward Goodenough, to grasp native point of view yang ada dalam alam pikiran maupun pandangan dunia kalangan informan, yang terbentuk berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka sebelumnya, baik pengetahuan/pengalaman di sekolah, rumah tangga, maupun lingkungan masyarakat secara makro.

Sebagaimana lazimnya dalam riset kualitatif, unit analisis dan informan dipilih secara sengaja (purposive) dengan

pertimbangan bahwa informan kunci tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman selama berinteraksi dengan warga bangsa lainnya yang berbeda pilihan identitas kultural (agama, suku bangsa, ras, dan antar agama). Sehingga informan yang menjadi sumber data serta informasi penelitian ini terdiri dari peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta, para pendidik, pemerhati budaya, dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

Data dan informasi terkait wawasan kebhinnekaan peserta didik Madrasah Aliyah akan dikumpulkan dengan memanfaatkan beberapa instrumen, dengan tetap berpatokan bahwa peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Sehingga, teknik pengumpulan data akan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan studi dokumen, karena sifat sumber data kualitatif yang beragam, multiple source of data, meminjam istilah Creswell (2009: 175).

Setelah data berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: organizing the data (mengorganisasikan data), selanjutnya data tersebut dikoding serta dikategorisasikan (coding and categorizing), ditelusuri polanya (looking for pattern), dan muaranya adalah tafsir data (interpreting the data). (Daymon et al, 2002: 237-239).

TEMUAN DAN ANALISIS

Performa Pendidikan di Kota Sorong

Jika kita membuka diskursus berkenaan dengan kinerja Pendidikan di Papua Barat secara makro, maka sejumlah problematika yang hingga kini masih menggelayuti pembangunan di bidang ini akan terpapar di depan kita, yang paling nyata menunjukkan realitas Pendidikan di Papua, yang perlu pemihakan secara khusus dari kalangan pengambil kebijakan, terejawantah dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Provinsi Papua Barat

dengan inherent di dalamnya tiga aspek, yaitu Pendidikan, kesehatan dan usia harapan hidup.

Pada titik inilah perlunya ikhtiar pemerintah daerah untuk mendorong proses transformasi pendidikan, terutama dalam kerangka perluasan akses, peningkatan daya saing (*competitiveness*), serta peningkatan (*empowering*) mutu layanan di segenap jenjang pendidikan. Paralel dengan ikhtiar tadi, beberapa program strategis reformasi (*tajdid*) peningkatan pendidikan untuk mendukung terejawantahkannya sumber daya manusia bermutu sekaligus menyiapkan generasi 2045 yang telah dicanangkan pemerintah sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.

Langkah strategis ini penting ditempuh pemerintah daerah, yang diorientasikan untuk merengkuh berkah dari besaran populasi Indonesia yang berada di usia produktif, termasuk penduduk usia produktif yang mendiami wilayah “kepala burung” Papua, yang juga bertepatan Negara ini telah menginjak usia 100 tahun pasca kemerdekaan, tepatnya pada periode 2010-2035 yang populer dengan istilah *bonus demografi* (*demographic dividend*).

Data Bappenas yang dirilis pada tahun 2014, menyebutkan 42,9 persen penduduk usia produktif hanya menyandang status tamatan SD dan sederajat, putus sekolah si bangku SD atau yang sama sekali belum pernah mengenyam bangku pendidikan. Data lain menyebutkan bahwa hampir separuh tenaga kerja hanya tamatan sekolah menengah pertama (SMP dan sederajat). Jika input SDM seperti ini, maka pembangunan akan mandek, bahkan terancam mengalami penurunan, industri yang berbasis ilmu pengetahuan yang kini menjadi tumpuan akselerasi pembangunan tak akan berkembang.

Dukungan pada peningkatan kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat terus dilakukan dengan memberikan afirmasi penyediaan fasilitas pendidikan dan beasiswa pendidikan menengah (Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM). Angka

Partisipasi Kasar (APK) pada pendidikan menengah di Papua dan Papua Barat terus meningkat. Berdasarkan Data pokok pendidikan (Dapodik) menunjukkan APK untuk SMA/SMK di Papua yang sebelumnya 47,96 (2015), meningkat menjadi 53,06 (2017). Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di Papua Barat, dari 76,55 (2015), menjadi 83,88 (2017).

Menurut Neraca Pendidikan Daerah yang disusun oleh Kemendikbud diperoleh informasi bahwa persentase anggaran urusan pendidikan di Papua Barat dalam APBD di luar transfer daerah, jauh di bawah 20 persen, hanya sekitar 2-3 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional (69,55), hanya sekitar 61-63. Sementara itu, uji kompetensi guru, baik guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK Papua Barat hasilnya di bawah rata-rata nasional. Indeks Integritas Ujian Nasional juga masih di bawah rata-rata nasional.

Berkenaan angka Partisipasi Kasar (APK) pada pendidikan menengah di Papua dan Papua Barat terus meningkat. Berdasarkan Data pokok pendidikan (Dapodik) menunjukkan APK untuk SMA/SMK di Papua yang sebelumnya 47,96 (2015), meningkat menjadi 53,06 (2017). Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di Papua Barat, dari 76,55 (2015), menjadi 83,88 (2017).

Senada dengan itu, Mendikbud, Muhadjir Effendi (dalam Syarif Uobaidillah, 2018) mengutarakan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pendidikan menengah di Papua dan Papua Barat terus meningkat. Data pokok pendidikan menunjukkan APK untuk SMA dan SMK di Papua yang di tahun 2015 sebesar 47,96 meningkat menjadi 53,06 pada 2017. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di Papua Barat dari 76,55 pada 2015, menjadi 83,88 pada 2017.

MA Kota Sorong

Berdasarkan data statistik pendidikan kota Sorong, hingga kini tercatat eksis dua satuan pendidikan

menengah dengan nomenklatur satuan pendidikan Islam, yakni Madrasah Aliyah Negeri yang dulu lebih populer dengan MAN Model, dan Madrasah Aliyah Insan Kamil yang berstatus madrasah Aliyah swasta. MAN Kota Sorong merupakan satu-satunya madrasah Aliyah dengan status negeri yang kini eksis di kota yang tepat berada di Ujung Barat Papua ini. Satuan pendidikan menengah ini dari sisi keterpenuhan komponen sistem Pendidikan nasional relatif telah terpenuhi, baik dari sisi sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses pembelajaran, standar isi dan standar lainnya. Tak hanya dari keterpenuhan standar lulusan, dan ketuntasan belajar, sebagian peserta didiknya telah mampu membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas, baik dari aspek kognitif (kecerdasan), psikomotorik (keterampilan), maupun afeksi (perilaku dan karakter yang baik). Di samping itu peserta didik MAN Model Kota Sorong juga mampu mencapai prestasi dari beberapa perlombaan yang sempat diikuti misalnya meraih juara III merancang robot pada tahun 2018.

Aggregat peserta didik MAN Kota Sorong Tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 791 orang, yang terdistribusi pada empat jurusan, terdiri dari jurusan/rumpun IPA, IPS, Bahasa, dan Agama. Kelas X terdiri dari 277 peserta didik meliputi: jurusan Bahasa 35 orang, jurusan IPA 108 orang, IPS 100 orang, dan agama 34 orang, adapun di kelas XI agregat peserta didik 263 orang, terdiri dari jurusan Bahasa 31 orang, jurusan IPA 120 orang, jurusan IPS 81, dan jurusan agama 31 orang, dan agregat peserta didik di kelas XI 251, terdiri dari jurusan Bahasa 38 orang, IPA 101 orang, IPS 89 orang, dan agama 23 orang. Kalangan peserta didik ini, kini dibina sekaligus di-mentoring sebanyak 53 orang pendidik dengan mengampu mata pelajaran yang berbeda, selaras dengan kualifikasi akademik mereka. Meskipun dari sisi kualitas masih belum sepenuhnya terpenuhi, sebab ternyata, rata-rata masih berkualifikasi S1 dan hanya 4 orang

pendidik yang telah mampu meraih gelar strata dua. Di Madrasah Aliyah Negeri Kota Sorong pun kini didukung seumberdaya manusia yang statusnya masih tenaga honorer yang tergolong cukup banyak, tepatnya ada sekitar 25 orang. Sementara eksistensi Madrasah Aliyah Insan Kamil berawal di tahun 2010, yang berada dalam naungan dan pengelolaan Yayasan Bela Bangsa yang menempati asset berupa tanah seluas 2 hektar ini, selain MA, juga terdapat satuan pendidikan di bawahnya, yakni SD/MI, dan MTs.

Wawasan Kebhinekaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dalam Perspektif Peserta Didik Madrasah Aliyah Kota Sorong

Diskursus tentang wawasan kebhinekaan dalam konteks Papua Barat, khususnya etnisitas (kesukubangsaan), tampaknya memiliki keunikan tersendiri ketimbang wilayah Nusantara lainnya. Meskipun dari sisi konfigurasi penduduk yang kini sangat heterogen, terutama setelah masifnya para pendatang yang memilih Papua Barat sebagai destinasi mencari nafkah untuk menyambung hidup. Baik migran yang sedari awal merupakan program pemerintah (Orde Baru), tepatnya program transmigrasi sejak tahun 1970-an yang didominasi dari penduduk Pulau Jawa, disusul kemudian etnis lainnya yang datang secara sukarela, misalnya Bugis, Makassar, Minang, Manado, Mandar, Batak, dan seterusnya. Melihat realitas politik kebangsaan di Tanah Papua Barat saat ini, maka membincang tentang etnisitas atau kesukubangsaan menjadi sebuah keniscayaan untuk kemudian memetakan problem solvingnya (solusi konstruktif) untuk mengurai masalah yang hingga kini menggelayuti wilayah tersebut.

Sementara itu, Timo Kivamaki (2006: 3) membagi penduduk Papua, termasuk di Papua Barat saat ini ke dalam dua arus besar berbasis pijakan etnisnya, yakni asli Papua yang berasal dari suku bangsa Melanesia dan para pendatang yang berasal dari Melayu/Asia, dari sisi

penampilan, lanjut Timo, sangat berbeda termasuk budaya, serta kebiasaan dengan mayoritas penduduk Indonesia pada umumnya.

Selain perbedaan budaya dan kebiasaan yang didorong oleh perbedaan kesukubangsaan dengan kebiasaan maupun pola hidup yang juga otomatis berbeda, maka dalam pilihan pekerjaan pun sangat tampak, misalnya orang-orang asli Papua lebih dominan bergerak di ranah birokrasi sehingga dengan mudahnya kita akan berpapasan mereka ketika menginjakkan kaki di perkantoran pemerintahan daerah, demikian pula di dunia politik, lebih didominasi orang Papua, meskipun ada beberapa orang migran yang menduduki posisi strategis, misalnya Wakil Walikota Sorong yang kini dipercayakan publik Sorong kepada dr. H. Fahima yang berasal dari Bugis.

Realitas sosial ini menunjukkan bahwa marginalisasi yang dialami penduduk asli Papua selama ini, kini mulai terkikis seiring dengan capaian peningkatan sumberdaya manusia di daerah ini. Sedangkan di sektor perekonomian lebih didominasi para pendatang terutama dari Bugis_Makassar, mereka hampir memenuhi deretan toko dan lapak yang ada di pasar Sorong, demikian halnya di sektor transportasi baik darat maupun penyeberangan antar pulau. Adapun para transmigran dari Pulau Jawa lebih fokus pada usaha pertanian/perkebunan.

Walaupun ada keunikan di kalangan komunitas Jawa di tempat ini, sebab mereka justru tidak ada yang membuka lahan persawahan, setelah ditelusiri, alibi mereka adalah bahwa tanah di Sorong tidak cocok untuk persawahan. "Karena tanahnya tidak cocok, maka kami berkebun saja, khususnya fokus menanam sayur-mayus untuk disuplay ke pasar, sementara orang Bugis, lanjut dia, lebih memilih untuk bergelut di ekonomi perdagangan, dan perikanan, Anda bisa temukan itu mereka di pasar, dan mereka bahkan ada yang memiliki sampai sembilan buha armada

penangkap ikan di sini."demikian deskripsi (MS/56 Tahun),

Kondisi sosial di Kota Sorong yang diklaim penduduknya sebagai daerah yang paling aman di Papua saat ini. Kondisi ini terkonfirmasi melalui survey tentang toleransi yang menenpatkan Papua Barat sebagai salah satu provinsi yang paling toleran. Dan, jika ditelisik lebih dalam, pada hakekatnya orang asli Papua sejatinya sangat terbuka, cenderung menghindari konfrontasi dengan pihak lain, Kalaupun terjadi riak-riak di akar rumput, menurut informan, biasanya justru diprovokasi dari pihak-pihak luar, yang ingin mengail keuntungan dari turbulensi sosial tersebut. Orang Papua acapkali memantik keributan yang sebenarnya tidak potensial memicu eskalasi, disebabkan kebiasaan mereka menenggak minuman keras.

Sehingga dalam konteks ini, orang Papua sejatinya berwawasan pluralis/multikulturalis dengan keterbukaan mereka menerima para pendatang. Kekecewaan yang kerap kali muncul ke permukaan biasanya hanya berupa tuntutan akan keadilan sosial, persamaan derajat dan perlakuan yang setara dari pemerintah semata. Sehingga, kalaupun tampak dalam relasi sosial yang cenderung meminjam istilah Amartya Sen dengan monokulturalisme majemuk, yang dimetaforkan Sen sebagai laksana kapal-kapal yang beraneka ragam, yang lalu lalang di malam hari tapi sekadar berpapasan, tanpa berbaur satu sama lain. Kalaupun ada proses interaksi namun sifatnya belum totalitas, sebab di beberapa kondisi proses marginalisasi masih kerap terjadi.

Di samping perbedaan budaya serta kebiasaan, relasi yang belum sepenuhnya multikulturalis itu, disebabkan oleh komunikasi antar budaya yang belum optimal, yang dalam perspektif Amartya Sen (2006) disebabkan dari kurangnya pengetahuan maupun pemahaman budaya lain dan juga gaya hidupnya (lack knowledge and understanding of other cultures and of alternative lifestyles). Salah

seorang guru yang mengampu mata pelajaran antropologi-sosiologi, menengarai bahwa perilaku orang asli Papua yang tak lepas dari pengaruh alam yang kemudian membentuk kepribadian mereka.

Dalam lanskap kebudayaan yang beragam; agama, ras, suku bangsa yang mewarnai relasi sosial di Kota Sorong sebagaimana yang dijelaskan diatas, termasuk dalam unit sosial terkecil seperti satuan Pendidikan, maka beresalan jika diklaim bahwa realitas sosial yang beraneka ragam atau plural, sejatinya menjadi sumber pengetahuan, pengalaman bahkan nilai ataupun norma yang diserap peserta didik ke dalam ranah kognitif yang kemudian membentuk persepsi serta pemahaman kebhinnekaan.

Persepsi kebhinnekaan tersebut dapat ditemukan melalui beberapa piranti yang lazim digunakan dalam riset kualitatif, yang juga menjadi instrumen penelitian ini, yakni wawancara mendalam dan observasi. Maka, terkait dengan esensi wawasan (insight) kebhinnekaan yang menjadi kekayaan mozaik budaya di Kota Sorong dengan heterogenitas yang tergolong tinggi, kalangan infotman yang notabene peserta didik yang kini duduk di kelas XI dan XII memiliki pemahaman yang baik mengenai keragaman elemen budaya (agama, suku bangsa, ras, dan antar golongan/aliran) yang ada di lingkungan masyarakatnya, tak hanya mengetahui dan memahami, juga telah mengalami proses relasi atau interaksi sosial dengan warga yang berbeda budaya dengan mereka.

Pengetahuan tersebut telah mengendap dalam domain kognitif informan, dan setelah diberi stimulasi melalui beberapa pertanyaan mereka dengan spontan dan tandasnya salah seorang informan (Irvan/16 Tahun), mengemukakan bahwa, "yang saya ketahui tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika," adalah suatu prinsip berwarganegara di Indonesia yang seharusnya berpegang teguh dengan kesatuan negara NKRI, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu

dalam bingkai NKRI."demikian paparan siswa kelas XI, jurusan IPA ini. Setali tiga uang dengan Abd Rahman Hardiansyah (16 Tahun) yang juga mengartikulasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, secara kontekstual, bahwa yang dimaksud berbeda-beda dalam semboyan tersebut tak lain adalah berbeda suku bangsa (etnis), agama, dan juga budaya, namun tetap dalam satu kesatuan". Tentunya dengan komitmen untuk saling menghargai dan saling menghormati, ujar Muhammad Afdal (16 Tahun).

Mengelaborasi penjelasan koleganya tadi, Misrywati siswa kelas XI IPA 3 ini dengan narasi yang selaras menyatakan bahwa, "Bhinneka Tunggal Ika maknanya walaupun kita berbeda agama, suku, asalkan tetap satu yaitu Indonesia." Dalam narasi yang lebih solid, Sitram Arum (15 Tahun) menandakan bahwa meskipun kita memiliki banyak perbedaan, tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang utuh." Artikulasi informan ini menunjukkan bahwa bahwa mereka memiliki pengetahuan. Meminjam proposisi Benjamin Bloom (1956: 75) sebagai: "particular abstraction which summarize observation of phenomena. Tak hanya sebatas mengetahui secara selintas, bahkan memiliki pemahaman berkenaan dengan keragaman budaya (cultural diversity) yang dalam nomenklatur kebangsaan lebih familiar dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan, wawasan tersebut telah mengendap dalam alam bawah sadar mereka, sehingga pada saat dirangsang dengan pertanyaan, maka respon balik mereka tamak sangat baik, sebagaimana penuturan mereka tadi.

Meskipun demikian, tak bisa dinafikan bahwa pemahaman diatas masih dalam kategori yang rendah dan sedang menurut kategori Bloom (1956: 91). Tepatnya, masih dikategori kemampuan mengungkapkan pengetahuan/pemahaman melalui proses translation dan kategori menengah dengan kemampuan mereka melakukan interpretasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Abstraksi kalangan peserta

didik tadi yang dalam teori Bloom diklaim keseluruhan dari hasil pengamatan mereka atas fenomena budaya yang beragam, lebih jauh mereka mampu mengategorisasikan kebhinnekaan tersebut.

Lebih menukik lagi, kalangan peserta didik memahami keragaman suku bangsa yang ada di Kota Sorong, baik etnis para pendatang misalnya, etnis Jawa, Bugis-Makassar, Ambon, Minang, Manado, Batak, Buton, dan sebagainya, bahkan ada orang Arab, mereka pun mengenal beberapa jenis etnis lokal yang kini eksis di Papua, Stepanus Malak memperkirakan bahwa, ada sekitar 250 kelompok etnis dengan kebiasaan, Bahasa, dan agama yang berbeda di Papua, tentu dengan ratusan norma adat yang juga berlaku kini (2016: 59) termasuk Kota Sorong.

Wawasan Kesukubangsaan

Berkenaan dengan struktur sosial, Indonesia dari sisi etnisitas tergolong sangat majemuk, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dan heterogenitas tersebut tampaknya sangat dipahami oleh peserta didik Madrasah Aliyah di Kota Sorong, hal itu tampak pada penjelasan Raudiati Ekha (17 Tahun) siswi Kelas XII MA Insn Kamil, yang mengklaim dari Jawa Timur ini, bahwa suku bangsa yang melekat secara kultural dalam diri warga Kota Sorong, terdiri dari suku Jawa, Ambon, Batak, Bugis, Makassar, Minang, Toraja, Kei, dan lain sebagainya, dan selain suku bangsa arus utama, ia pun mengenal beberapa suku di internal orang Papua, diantaranya: Ayamaru, Kokoda. Senada dengan Ekha, koleganya La Ode Hardiansyah (17 Tahun) dari Buton, menambahkan bahwa sepengetahuan dia, bahwa masih ada suku lainnya, yakni suku Seram, Suku Kalimantan, dan Suku Manado, di internal Papua ia mengenal suku Moi, Ujamena, Inanwatan, suku Serui, suku Bintuni, suku Fak-Fak, Misool, dan suku Buton.

Mengelaborasi deretan suku/etnis yang dikemukakan koleganya si atas, Irvan (17 Tahun) siswa MAN Kota Sorong ini, dengan fasih menyebut misalnya suku

bangsa Moi, Kokoda, Ayamaru, Maybrat, Asmat, Serui, Biak, dan Inawatan, dan suku pendatang terdiri dari suku Jawa, Minang, Etnis Tionghoa, Batak, Bima, Buton, Sunda, Bugis-Makassar. Beberapa suku tersebut terpresentasi pada beberapa orang peserta didik yang kini menimbah ilmu di kedua satuan pendidikan menengah tersebut (MAN dan MA Insan Kamil). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peserta didik ini didominasi suku Jawa dan Bugis-Makassar, sedangkan peserta didik asli Papua hanya ditemukan beberapa orang saja, terutama dari suku Kokoda.

Deskripsi peserta didik diatas menandakan bahwa dari sisi domain kognitif, mereka memahami keragaman suku bangsa yang ada di Kota Sorong, baik etnis para pendatang melalui program pemerintah (transmigrasi) maupun dengan melalui migrasi secara mandiri, bahkan menurut meeka ada juga etnis Tionghoa dan orang Arab, mereka pun ternyata mengenal dengan baik, beberapa etnis lokal yang kini eksis di Papua yang diklaim Stepanus Malak bahwa ada sekitar 250 kelompok etnis dengan kebiasaan, Bahasa, dan agama yang berbeda di Papua, tentu dengan ratusan norma adat yang juga berlaku kini (2016: 59) termasuk Kota Sorong.

Uniknya, diantara pemangku suku asli Papua yang berbeda-beda tersebut Menurut Della Rosa (17/Tahun) ternyata menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi sebab masing-masing suku memiliki bahasa sendiri. Sehingga untuk menepis kesulitan itu, orang-orang Papua dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda itu memilih Bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam interaksi sosial, maka wajar jika hampir semua orang orang Papua mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik yang tinggal di wilayah urban, seperti Kota Sorong maupun yang mendiami wilayah pedalaman sangat fasih berbahasa Indonesia. Selain perbedaan bahasa, masing-masing suku memiliki sikap dan kepribadian yang khas, terutama perbedaan sikap dan perilaku antara orang Papua yang mendiami wilayah pedalaman/pegunungan

dengan orang Papua yang kini memilih tinggal di wilayah pesisir, dan di pusat perkotaan.

Kini, mulai tampak modal sosial yang ke depan akan memiliki peran signifikan dalam upaya membangun pemahaman kebhinnekaan maupun wawasan multikultural di kalangan masyarakat Kota Sorong, yakni terciptanya ikatan pernikahan antara penduduk lokal dengan etnis pendatang, sebagaimana yang diklaim Farhan (17/Tahun), siswa kelas XI IPA 3, yang memiliki ayah dari suku Bugis dan ibu asli Papua. Dan, kini pun keluarganya tinggal di komunitas yang heterogen secara kesukubangsaan. Tak hanya di kelurganya, di beberapa kesempatan Wakil Ketua OSIS ini menjumpai keluarga yang sama dengan keluarga intinya (nuclear family); etnis pendatang yang menikah dengan orang Papua. Hal yang sama juga diklaim Della (17 Tahun), bahwa ia berasal dari keluarga yang dibangun dari latar belakang etnis yang berbeda, ibunya asli Papua etnis Inanwatan, sementara ayahnya asli Jawa, Jawa-Papua, demikian ia mendaku dengan bangganya, termasuk Yahya Rumbewa yang mengaku peranakan Bugis-Biak (Papua).

Interaksi sesama peserta didik pun sangat cair di tengah kemajemukan dari sisi etnis tersebut, hal itu dikemukakan M. Said (17/Tahun) di sini ada beberapa teman kami dari etnis Papua, misalnya dari Kokoda, dan kami bergaul seperti layaknya teman dari sesama suku, sebab pada prinsipnya, kami berada di sini semata untuk belajar, bukan untuk membeda-bedakan etnis tertentu. Dan walaupun ada masalah sosial atau kericuhan yang muncul, itu bukan dilakukan orang-orang di sini, melainkan selalu dipicu serta diprovokasi dari pihak luar, dan itu mulai semenjak kerusuhan Ambon di awal tahun 2000-an, meskipun harus diakui juga bahwa karena pengaruh alam ada perilaku tertentu dari saudara kita di Papua yang jika berbicara atau berkomunikasi kedengarannya keras, tapi itu alamiah saja, hasil terpaan alam yang juga keras-panas, maka kita harus

memaklumi pola komunikasi yang dibentuk oleh budaya mereka, sebab pada dasarnya mereka itu sangat baik, dan terbuka terhadap siapa pun, walaupun selama ini muncul masalah sosial, itu semata karena mereka menuntut diperlakukan secara adil, dan itu wajar saja.

Meminjam tesis Hartoyo, “Orang di sini (Papua) sangat baik, hanya ketidakadilan di bidang ekonomi saja yang kerap kali mereka tuntut dari pemerintah, lain tidak”. Tandasnya. Dan kini pemihakan itu sudah mulai tampak, misalnya, rekrutmen pegawai negeri yang memberikan alokasi/quota terbesar bahkan mencapai 80 persen untuk orang asli Papua, sebagai pengejawantahan pemihakan terhadap suku bangsa Papua yang selama ini termarjinalkan di hamper semua lini. Demikian pula posisi strategis di birokrasi, mereka sebagian besar berada di bagian arus utama, para pendatang dominan hanya sebagai pelaksana dan staf biasa saja. Walaupun ada penduduk pendatang yang menduduki jabatan struktural itupun dibatasi beberapa persen saja.

Pemahaman peserta didik akan akan keragaman etnisitas ini yang kemudian mengendap dalam alam bawah sadarnya, akan membentuk pemahaman dan pandangan dunia yang akan mempengaruhi cara mereka melihat dunianya, lingkungannya, termasuk peranan yang sejatinya mereka dalam interaksi sosial yang sarat dengan kebhinnakaan tersebut. Sehingga, jika mengacu pada teori pemahaman/pandangan terhadap dunia yang dikonstruksi Marquiritte G. Kraft (dalam Eilers, 1987: 92), bahwa dalam budaya kita, pemahaman/pendangan kita memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi menerangkan. Fungsi ini mendorong pemahaman tentang posisi diri sendiri, perbedaan antara berada dalam kelompok dan di luar kelompok, hubungan dengan lingkungan sekitar, orientasi terkait ruang dan waktu serta nilai-nilai dan norma. Di titik inilah pentingnya penanaman atau proses internalisasi nilai-nilai kebhinnekaan itu dilakukan, untuk menumbuhkan

pemahaman yang kebhinnekaan yang sifatnya inklusif, bahwa keberagaman budaya adalah sesuatu yang perlu diterima sebagai berkah, sesuatu yang bernilai untuk junjung tinggi bersama, dengan tetap berusaha mencari titik temu/kesamaan dalam keragaman budaya atau kebhinnekaan tersebut.

Pengelolaan kebhinnekaan secara kultural di Kota Sorong hingga kini tergolong masih sangat efektif, sebagaimana yang diklaim Abdullah Malawat, walaupun kadang muncul riak-riak dalam proses interaksi sosial, itu hanya persoalan sepele, hanya ketersinggungan, terutama kebiasaan sebagian orang Papua yang masih sering menenggak muniman keras, dan memalak. Tapi, khususnya kebiasaan memalak ini, salah seorang sopir angkot yang mengaku dari Ambon (Muslim), bahwa kebiasaan tersebut sebenarnya bukan murni perilaku orang asli Papua, sebab mereka sangat patuh pada hukum adat dengan sangksi yang berat, sehingga apabila mereka kerap meminta uang di jalan, itu sepenuhnya merupakan hasil proses meniru dari pelaku buruk para pendatang yang kerap kali meminta uang dalam keadaan mabuk, secara spontanitas orang-orang Papua pelan tapi pasti meniru kelakuan buruk tersebut, “jadi, sebenarnya kita yang mengajari mereka”, demikian tandasnya. Perilaku yang ditiru dari para pendatang yang mendapatkan rangsangan yang mereka rasakan menyenangkan mendapatkan uang dengan mudah lalu menjadi kebiasaan bagi beberapa oknum tersebut, yang dalam teori yang dikembangkan EL. Thorndike sebagai hukum efek.

Ironisnya, perilaku yang suka memalak yang sejatinya merupakan hasil belajar dan meniru dari perilaku buruk para pendatang itu, lalu dilekatkan sebagai bagian dari prasangka etnis ataupun stereotyping berbasis etnis, padahal mereka yang mengajari perilaku tersebut. Tak sampai di situ, kasus-kasus pembegalan yang mulai menyeruak di Papua Barat, tak terkecuali Kota Sorong menurut salah

seorang akademisi di kota ini, itu juga dilakukan para pendatang terutama dari Sulawesi, dan dikhawatirkan perilaku buruk itu akan menular pada oknum orang Papua yang sejatinya sangat konsisten patuh pada adat.

Kota Sorong dianggap sebagai wilayah yang paling aman di Papua, menurut Hartoyo, Kabid Pembauran, Badan Kesbangpol Kota Sorong, sebenarnya ada beberapa modal sosial yang mendukung, termasuk paguyuban yang terbentuk di hampir semua suku yang ada, sehingga melalui paguyuban tersebut koordinasi, komunikasi serta mobilisasi dengan efektif dapat dilakukan jika muncul turbulensi sosial, melalui paguyuban ini upaya pemerintah untuk membangun proses pembauran ataupun asimilasi antar etnis lebih mudah dilakukan dalam kerangka menjaga kestabilan, dan kerukunan antar masyarakat, dan tentunya keutuhan NKRI. Sebab, menurut Robert W Hefner (2001: 1)) masalah perpecahan etnis, agama, dan linguistic yang tajam di masyarakat merupakan momok yang manakutkan bagi Negara yang ingin menata kewarganegaraan yang demokratis. Hartoyo kemudian menyebut beberapa paguyuban tersebut, sebagai berikut: KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan), Forum Lintas Papua Asli, IKM (Ikatan Keluarga Minang), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), FKUB, KKMU (Kerukunan Keluarga Maluku Utara), IKIM (Ikatan Keluarga Maluku), dan seterusnya.

Selain itu, di kalangan masyarakat Kota Sorong yang sangat majemuk secara kultural tersebut, namun tetap rukun yang terkonfirmasi melalui hasil survey kerukunan dengan raihan tinggi dengan basis poin 80 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, juga karena masing-masing etnis masih memegang teguh kearifan lokal yang sarat dengan pesan perdamaian, gotong royong, dan saling menghormati. Hal itu tampak pada prinsip satu tungku tiga batu yang dipegang teguh masyarakat Papua khususnya yang berasal dari wilayah Fak-Fak, Kaimana dan sekitarnya, anu beta

tubat (kita angkat bersama-sama) yang sangat dipegang teguh masyarakat Papua, khususnya etnis Ayamaru.

Tetapi, dalam realitas obyektif, relasi kesukubangsaan tersebut harus diakui masih menyimpan benih konflik karena masing-masing pihak ingin mengamankan identitas etnisnya, sehingga hal ini membutuhkan penyikapan secara bijak baik melalui kerja sama, gorong royong, ko-ensistensi, dan negosiasi kalau perlu, disertai tata kelola yang baik terhadap kebhinnekaan suku tersebut, perselisihan itu bisa dipicu faktor kecemberuan sosial, ketimpangan ekonomi yang sangat lebar antara penduduk pribumi Papua, dengan para pendatang, dan pemandangan itu sangat kasat mata. Penduduk pribumi Papua yang bergerak dalam ekonomi informal hanya mengambil tempat yang seadanya di pinggir-pinggir jalan dan emperan toko, dengan menjajakan buah-buahan dan buah pinang yang menjadi makanan khas penduduk wilayah ini, pemandangan pilu ini sangat jamak kita temukan di kota Sorong dan kab/kota lainnya di Papua.

Wawasan Keragaman Agama

Tak hanya pemahaman (kognitif) peserta didik terhadap kemajemukan dari sisi etnisitas/kesukubangsaan, mereka pun telah menerima informasi/pengetahuan berkenaan dengan kemajemukan atau heterogenitas agama yang kini eksis di Indonesia, termasuk di Kota Sorong, tengok misalnya Afni Mardhyanti (16 tahun) siswa IPA 1 Kelas XI MAN Kota Sorong, dan Della Rosa, (17 Tahun) siswa MA Insan Kamil, blesteran Jawa-papua ini mengkalim mengetahui keberadaan agama-agama yang kini eksis di Kota Sorong, mereka dengan lancarnya menyebutkan keenam agama yang secara resmi mendapatkan pelayanan dari negara-meliputi: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu, meskipun harus diakui bahwa keduanya masih kerap kali lupa bahwa selain Kristen, juga ada agama Katholik, asumsi mereka bahwa kedua agama sama-sama Kristen. Jawaban mereka

tampak pada pertanyaan terstruktur yang diajukan.

Pemahaman yang berbeda juga muncul dalam penyebutan agama tertentu, meskipun kita dapat memahami maksudnya, misalnya Wahyu Nojeng (16 Tahun), siswa asal Makassar ini menyebutkan beberapa agama yang eksis di kotanya meliputi: Islam, Nasrani, Hindu dan Buddha. Asru Nota Nubun (17 tahun) dengan spontan menyebut bahwa di Kota Sorong eksis beberapa agama, terdiri dari Islam, Kristen, Katholik, Buddha, Hindu, dan Nasrani.

Kemampuan yang selaras juga tampak pada pengetahuan Rahma Dwi Ayu Ariani (15) kelas X IPA 3. Meskipun jika ditelisik lebih dalam, masih tampak ada kekurangan-jika tidak lupa-, yakni kemampuan untuk membedakan antara agama Kristen dengan agama Katholik, walaupun dapat dipastikan bahwa, mereka pasti pernah bahkan selalu mendapatkan informasi tentang kedua agama tersebut, bahkan mungkin bertetegur sapa dengan penganut kedua agama tersebut di media sosial yang kini menjadi wadah silaturahmi anak-anak millennial dan generasi Z. Sebab, ternyata teman kelasnya yang lain justru menyebutkan secara lengkap keenam agama tersebut, Nurul Rabiatul Adawiyah (16 Tahun), menyebutkan pada agama-agama yang kini memiliki penganut di Kota Sorong terdiri dari: agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katholik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Khong hu cu.

Para peserta didik ini mengklaim memiliki teman/shahabat yang berbeda anutan agama dengan mereka, terutama yang beragama Kristen, dan rata-rata anak-anak asli Papua, di luar sekolah mereka berinteraksi seperti biasa layaknya anak-anak muda di kota lain, rutin bermain futsal bersama, kongko-kongko di kafe, dan di tempat-tempat hiburan lainnya, kami tak ada jarak sosial diantara kami.”

Dan, walaupun terjadi kericuhan dan pertengkaran, itu semata faktor kesalahfahaman semata yang tak ada

hubungannya dengan agama. Madrasah kamipun biasa diserang sekolah lain seperti STM yang melempari madrasah, tapi itu hanya persoalan kesalahpahaman juga, sebagaimana tawuran yang terjadi di daerah lain, perkelahian yang melibatkan siswa antara dua sekolah, dan itu biasa saja, dan sama sekali tak terkait dengan masalah agama. Pemahaman kebhinnekaan ini mengonfirmasi hasil survey kerukunan dan pemahaman umum masyarakat bahwa relasi antaragama di kota ini dapat diklaim berjalan dengan sangat baik, meskipun tidak bisa dinafikan bahwa tingkat heterogenitas sosial tersebut tetap saja menyimpang potensi konflik, sehingga dibutuhkan berbagai cara pengelolaan relasi social tersebut agar potensi konflik tersebut bias ditekan seminimal mungkin. Termasuk penguatan pemahaman kebhinnekaan serta pluralisme kewargaan berbasis agama mulai dari rumah tangga, sekolah, dan lingkungan sosial (wawancara dengan Abd Rahman Rahawan).

Yang menarik dari pemahaman kebhinnekaan peserta didik ini adalah penolakan mereka untuk mengucapkan selamat pada hari raya agama tertentu, misalnya natal, hampir semua responden mengatakan agamanya tidak membolehkan, dan itu didukung oleh beberapa orang pendidiknya, dan itu bias dimaklumi sebab di kalangan ulama juga masih terjadi ikhtilaf (perbedaan pendapat) terkait dengan boleh-tidaknya mengucapkan selamat natal. Tetapi, dalam prosesi-tentu tidak terkait dengan ibadah-perayaan tersebut terbuka untuk melakukan silaturahmi ke rumah-rumah kolega mereka, dan menyantap makanan dan hidangan lainnya yang disiapkan.

Pemandangan yang merupakan type ideal wawasan kebhinnekaan dan toleransi antar umat beragama sebagaimana diklaim dengan bangganya kepala kampung Kokoda Wormon, Syamsuddin, bahwa jika ingin menemukan masyarakat yang toleran dengan kedamaian yang sangat aktif, maka itu ada dalam suku-suku di Papua, khususnya di dalam komunitas Kokoda.

Dalam satu rumah tangga lazim ditemukan anggota keluarga yang berbeda anutan agama; ada yang Muslim dan ada juga yang Kristiani, dan itu biasa saja.

Wawasan kebhinnekaan dalam konteks keragaman Ras

Konsep ras dalam penelitian lebih mengacu pada beberapa artikulasi yang dikemukakan Cohen (1992), yang memaknai konsep ras sebagai kategori individu yang secara turun temurun memiliki ciri-ciri fisik serta biologis tertentu yang sama, jadi lanjut Cohen, kita dapat mengategorikan individu-individu ke dalam kategori-kategori rasial dengan cara mengamati penampilan fisiknya. Lebih lanjut Cohen mengemukakan perbedaan ras dengan suku bangsa yang kerap kali digunakan secara tumpang tindih, sebab suku bangsa (etnis) menurut dia dilihat berdasarkan karakteristik kebudayaan yang dimiliki anggotanya.

Diskursus mengenai ras relevansinya dengan pemahaman kebhinnekaan, kalangan peserta didik relatif telah berkenalan dengan konsep tersebut, tentu melalui mata pelajaran antropologi-sosiologi, meskipun masih dalam tataran/level tahap I Bloom (dalam Moore, yakni mengetahui/knowledge, peserta didik memiliki kemampuan untuk “memanggil”(recall) materi pembelajaran yang sebelumnya telah dipelajari. Hal ini tak lepas metode pembelajaran yang masih berkuat pada pemenuhan domain kognitif, dimana pendidik lebih dominan memilih metode ceramah dibanding metode pembelajaran lainnya yang lebih progresif sebagaimana yang telah diafirmasi dalam Kurikulum 2013.

Pengetahuan peserta didik terkait keanekaragaman ras diantaranya menurut mereka adalah ras Mongoloid yang merupakan nenek moyang-leluhur manusia yang mendiami wilayah Asia, termasuk Asia Tenggara, sementara orang asli Papua terafiliasi ke Ras Melanesia dengan ciri-ciri fisik yang relatif berbeda dengan para pendatang yang terafiliasi ke ras Mongloid-

Asia-Melayu. Muhammad Arif (16) peserta didik MA Insan Kamil ini menguraikan bahwa setidaknya ada beberapa jenis ras yang pernah dipelajari, yakni ras negroid yang kulitnya hitam, ras Mongolia, tapi mungkin maksudnya mongoloid, dan kaukasus, sayangnya ia belum mampu mendeskripsikan lebih dalam, khususnya perbedaan ketiga ras ini. Pemahaman yang sama juga tampak pada respon

Selaras dengan itu, Timo Kivamaki (2006: 3) membagi penduduk Papua, termasuk di Papua Barat saat ini ke dalam dua arus besar berbasis pijakan etnisnya, yakni asli Papua yang berasal dari suku bangsa Melanesia dan para pendatang yang berasal dari Melayu/Asia, dari sisi penampilan, lanjut Timo, sangat berbeda termasuk budaya, serta kebiasaan dengan mayoritas penduduk Indonesia pada umumnya.

Masih dalam kerangka teori Benjamin Bloom, teridentifikasi pola pemahaman peserta didik Madrasah Aliyah negeri Kota Sorong yang beranjak ke level; mampu melakukan interpretasi terhadap kebhinnekaan ras masyarakat Sorong yang setiap saat mereka berpapasan, Bloom (1956: 94) mengartikulasikan tahap ini sebagai kemampuan peserta didik "...clarify various types of reading material." Dan menurut informan, secara garis besarnya ada 2 jenis ras yang sangat menonjol di daerah ini, yakni ras atau sebagian besar Melayu, yang merupakan penanda atau ciri-ciri biologis para pendatang, dan ras Melanesia yang tampak pada ciri-ciri biologis penduduk tempatan.

Bagi informan, komunikasi secara intensif di antara masyarakat dengan ras yang berbeda ini akan menciptakan kesalingpahaman, saling menghormati, serta saling menghargai. Sebab, persoalan ras ini yang sangat sensitif di Kota Sorong, dan Papua pada umumnya, dan itu perlu dikelola dengan baik, lanjutnya. Sebab, jika muncul stigmatisasi, dan stereotype berdasarkan ras, seperti kasus Surabaya yang viral itu, pelecehan yang bernuansa rasis terhadap mahasiswa Papua telah

memantik protes secara masif di hampir seluruh Papua, dan puncaknya adalah kerusuhan di Manokwari dan Sorong meskipun tak sampai eskalatif, ternyata dalam kasus seperti ini bagi informan, dampaknya dirasakan masyarakat Papua secara umum, termasuk masyarakat pendatang. Deskripsi informan ini sejalan dengan Green (dalam Abdullah, 2010: 42) bahwa konflik yang berbasis perbedaan ras, etnik, suku, lokalitas, serta sejarah kerap menjadi tekanan berat bagi masyarakat.

Dalam konteks kebhinnekaan berbasis ras ini, dibanding dengan wilayah lain di Nusantara, Papua, khususnya Kota Sorong perlu mendapatkan perhatian lebih cermat berkenaan dengan relasi social, sebab di wilayah inilah secara langsung maupun telanjang kedua ras yang berbeda bertemu setiap saat dengan kepentingan yang berbeda, tentu dengan klaim kebenaran dan klaim superioritas ras masing-masing, sehingga kecermatan mengelola perbedaan ras tersebut menjadi penting, sebab juga komponen ras ini diusik maka dampaknya akan luas. Peristiwa rasis yang terjadi beberapa bulan lalu di Surabaya menjadi pembelajaran penting untuk dihindari. Kasus rasisme terhadap mahasiswa pada saat terjadi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya yang dilakukan oleh ormas tertentu, sambil mengeluarkan kata-kata makian yang bernada rasis, aksi yang kemudian viral di media sosial yang beresonansi hingga memantik kemarahan hingga pengrusakan di beberapa kota di Papua yang dilakukan penduduk pribumi Papua, tak terkecuali di Kota Sorong.

Bahkan, imbas dari kasus stereotype berbasis ras itu, kegiatan pembelajaran di Madrasah Aliyah negeri Kota Sorong sempat diliburkan selama 3 minggu, karena kondisi Kota Sorong kala itu yang cukup mencekam. Selaras dengan itu, muncul pembenaran dari Frans Pekey (2018: 95), bahwa konflik yang selama ini terjadi, bahkan sampai berkepanjangan di Papua, karena sebagian orang Papua masih merasa berbeda antar ras dan rumpun Melanesia

dengan ras dan rumpun Melayu-Mogoloid, ini menandakan bahwa di kalangan orang Papua, dan para pendatang tentunya masih terobsesi dengan sikap etnosentrisme yang merasa bahwa sukunya atau kelompoknya yang paling superior dari suku atau kelompok lain, sikap ini yang kerap bermuara pada sikap rasis sebagaimana yang terjadi di Surabaya baru-baru ini, yang menjadi hambatan dalam proses asimilasi ataupun pembauran yang selama ini diprogramkan pemerintah (Pusat dan Daerah). Superioritas bahkan hegemoni etnis ini juga acapkali mengemuka melalui dugaan adanya upaya untuk membangun piramida sosial yang segregatif, berdasarkan etnis dan anutan agama, meskipun asumsi tersebut masih perlu pendalaman. Sebab, di beberapa kasus peluang para pendatang untuk menempati posisi strategis di birokrasi pemerintahan misalnya tampak masih terbuka, misalnya wakil walikota yang kini dijabat dr. Fahima yang berasal dari etnis Bugis.

Wawasan Kebhinnekaan dalam Konteks Aliran Antar Agama

Tak hanya pemahaman terkait kebhinnekaan agama sebagaimana yang dijelaskan diatas, kalangan peserta didik juga sudah familiar dengan beberapa aliran/golongan dalam agama, mereka mampu menyebutkan beberapa aliran tersebut, diantaranya organisasi keagamaan arus utama di Indonesia yang kini mayoritas jamaahnya di Kota Sorong menurut informan (peserta didik MAN dan MA), yakni Jam'iyah Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan beberapa aliran yang muncul belakangan, misalnya Salafi, Wahabi, Jamaah Tabligh, dan simpatisan HTI. Sehingga, di kota ini kerap kali kita akan berpapasan dengan wanita Muslimah yang mengenakan cadar. Aliran keagamaan ini secara aktif menjalankan kegiatan keagamaan, termasuk pendirian lembaga pendidikan, seperti pesantren, dan keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial-ekonomi.

Di tengah menyeruaknya aliran-aliran keagamaan salafi, wahabi dan jam'iyah kecil lainnya, ritual keagamaan yang masih dominan ditemukan di kota ini adalah ritual keagamaan muslim arus utama tadi; NU dan Muhammadiyah. Misalnya ritual keagamaan yang secara rutin diselenggarakan di Masjid Raya al-Akbar yang tepat berada di dalam kota, yang dapat diakses dengan mudah dari berbagai penjuru kota, demikian pula masjid Quba yang tepat berada di pusat perekonomian (pasar) kota, kedua masjid ini dikelola oleh umat Islam dari berbagai penjuru Nusantara.

Di samping aliran keagamaan dalam domain Islam, aliran keagamaan non muslim di Kota Sorong juga banyak ditemukan yang terejawantah pada afiliasi denominasi mereka, khususnya agama Kristen dan Katholik yang tergolong banyak penganutnya di wilayah ini. Afiliasi keagamaan ataupun denominasi aliran keagamaan mereka dengan mudah ditemukan pada gereja mereka; Kristen maupun Katholik, baik yang eksis di pusat perkotaan maupun yang di wilayah peripheral kota. Beberapa denominasi tersebut misalnya Gereja Maranatha, Gereja Pantekosta, Gereja Advent, Gereja Eikumene, Gereja Injili, Gereja St. Katholik, Gereja Baptis Anugrah, Gereja Eden, Gereja Bethel, Gereja Syaloom, dan Paroki serta Katedral. Di samping rumah ibadah agama Kristen, di Kota Sorong juga dengan mudah menemukan rumah ibadah agama lain, seperti Vihara Budhha Jayanti, tak hanya rumah ibadah, beberapa denominasi gereja tersebut juga memiliki instirusi pendidikan yang hamper semua berada dalam area lingkungan gereja.

Sumber Pemahaman Kebhinnekaan Peserta Didik

Sejatinya, lazim dikenal sumber-sumber pengetahuan dan pengalaman yang secara berkelindang terbentuk dalam alam bahwa sadar peserta didik, dan mengisi komponen kognitifnya, yang sejak awal disadari oleh pengampu kebijakan

pendidikan sebagai tiga pusat pendidikan, yakni keluarga sebagai institusi pendidikan yang pertama dan sekaligus utama, sekolah/madrasah, dan lingkungan masyarakat.

Ketiga ranah ini pula yang secara konvensional menjadi sumber dan rujukan pengetahuan maupun pengalaman peserta didik MAN Kota Sorong. Ilham Wildan (16 Tahun), mengklaim mendapatkan pengetahuan terkait kebhinnekaan melalui beberapa sumber, yakni, madrasah, rumah, lingkungan masyarakat, dan media sosial. Pemahaman kebhinnekaan peserta didik yang diperoleh melalui tripusat pembelajaran tadi, tentu saja memiliki tingkat efektifitas yang berbeda yang menjadi alasan informan lebih mengutamakan salah satunya. Apalagi seiring berjalannya waktu media dan sumber pembelajaran semakin mengalami peningkatan dan pencanggihan, misalnya kehadiran perangkat teknologi, terutama media daring yang kini hampir semua peserta didik memilikinya, media sosial tersebut sarat dengan informasi yang sangat mudah diakses oleh peserta didik.

Mengelaborasi pengakuan koleganya tadi, Dwi Afni (17 Tahun) menyebutkan sumber-sumber pemahaman kebhinnekaan dengan mengklaim, "Informasi tentang kebhinnekaan atau Bhinneka Tunggal Ika, dan nasionalisme dapat saya ketahui dari pelajaran di madrasah, situs-situs internet, dan lingkungan masyarakat. La Ode Herdiansyah (17 Tahun) juga begitu, masih tetap merujuk pada ketiga pusat pendidikan tadi sebagai sumber-sumber pendidikan termasuk data dan informasi yang diklaim mampu menambah wawasannya tentang kebhinnekaan, yakni semua sumber menurutnya, madrasah, rumah, lingkungan masyarakat dan juga media daring. Dalam nalar yang selaras, Rabiatul Adawiyah (16 Tahun) mengemukakan hal yang sama ketika ia menyatakan, "saya mendapat informasi tentang wawasan bhinneka tunggal ika melalui pembelajaran di sekolah/madrasah,

rumah, lingkungan sosial dan perangkat media daring."

Uniknya, setelah ditelisik melalui pertanyaan, sumber-sumber mana yang paling dominan saat ini dijasikan sebagai sumber pemahaman kebhinnekaan dan data pendidikan lainnya, muncul fenomena adanya pergeseran pilihan dari sumber-sumber informasi yang sifatnya konvensional, yakni tripusat pendidikan tadi dan mengarahkan minat untuk lebih banyak menyandarkan keingintahuannya pada sumber terbaru; tepatnya media daring. Tengok misalnya Fifi Dwi Irawati (17 Tahun) menyebut media sosial dan lingkungan masyarakat yang lebih banyak menyediakan informasi tentang kebhinnekaan tanpa menyebur institusi utama yang secara konvensional menjadi sumber data dan informasi yakni sekolah/madrasah dan keluarga.

Bahkan Rezki Agha Bakhtiar (16 Tahun) dengan percaya dirinya mengemukakan bahwa sumber informasi dan pemahaman kebhinnekaan dan tentu saja informasi lainnya lebih banyak merujuk pada apa yang telah disediakan media daring, tanpa menyebutkan sumber dan atau institusi pendidikan lainnya. Sebaliknya, koleganya, Rabiatul Adawiyah masih mengadakan sumber pembelajaran yang ada di madrasah/sekolah, dan merasa masih memadai informasi yang ada dalam buku-buku dasar sekolah yang diajarkan para pendidik, namun, lanjut dia, hanya masih menyempatkan waktu untuk menambah pemahaman tersebut melalui media daring.

Di madrasah misalnya, peserta didik mendapatkan pembelajaran yang memuat informasi mengenai kebhinnekaan melalui beberapa mata pelajaran, diantaranya PPKN, Antropologi-Sosiologi, Sejarah, Akidah Akhlaq, Basir Said (54 tahun) guru antropologi-sosiologi mengemukakan bahwa peserta didik mendapatkan pembelajaran mengenai suku bangsa, ras, kurukunan beragama, toleransi, perubahan budaya, IPTEK.

Namun, sayangnya, pemahaman kebhinnekaan yang diperoleh peserta didik di madrasah ini baru semata berdasarkan pembelajaran dalam kelas, semata transfer knowledge dari pendidik ke peserta didik, belum ditindak lanjuti ke dalam pola pembelajaran yang melampaui pemenuhan ranah kognitif peserta didik an sich, hal itu diakui kalangan pendidik di Madrasah Aliyah, dengan melakukan terobosan untuk mendesain pembelajaran ekstrakurikuler hingga membangun budaya madrasah yang berwawasan kebhinnekaan.

Tampaknya, sebagian peserta didik di MAN Kota Sorong telah mengalami pergeseran berkenaan dengan sumber-sumber pengetahuan, tak terkecuali kebhinnekaan, mereka mengklaim dominan lebih banyak mendapatkan informasi tersebut dari media sosial, atau situs-situs internet. Respon yang sama tampak dari jawaban spontan dari Rezky Aqlia (17 Tahun) bahwa ia mendapatkan pengetahuan melalui media daring (digital).

Ini menandakan bahwa sumber-sumber pembelajaran konvensional seperti buku-buku teks (daras) yang diajarkan pendidik tak lagi menjadi sumber bahan ajar paling utama dan dominan, justru kini peserta didik lebih meminati berselancar di jejaring media digital, proses literasi mereka tak lagi melulu konvensional, melainkan literasi digital yang selaras dengan kebutuhan, tuntutan bahkan passion generasi Z ini. Meskipun demikian, masih terdengar juga respon positif terhadap pembelajaran di madrasah, hal itu tampak beberapa peserta didik-walaupun sedikit-yang masih mengandalkan sumber pembelajaran di madrasah. Tak melulu mengandalkan media sosial.

Meskipun pemahaman kebhinnekaan yang diperoleh semata melalui pembelajaran konvensional/klasikal di kelas, baik mata pelajaran PPKn, Antropologi-Sosiologi, dan sebagainya, manun peserta didik secara proaktif melangkah pada tataran implementasi pemahaman kebhinnekaan di kalangan peserta didik, pengurus OSIS

MAN Kota Sorong secara proaktif ingin meneguhkan wawasan kebhinnekaan melalui gelaran seminar bela negara yang berhasil diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2019, dengan melibatkan para pelajar dari SMA dan SMK Sorong Raya (Kota Sorong dan Kabupaten Sorong) sebagai peserta seminar. Menurut Noval, Ketua OSIS ada sekitar 160-an peserta didik yang hadir pada seminar tersebut. Kegiatan seminar bela negara tersebut menghadirkan narasumber dari pihak TNI, Kepolisian, Pemerintah Kota, dan DPRD. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak terutama dari pemerintah kota, dan direncanakan kegiatan ini akan bersifat kegiatan rutin setiap tahun.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan seminar ini menurut Farhan (Sekretaris OSIS), dalam upaya membangkitkan rasa patriotisme serta bela Negara dan bangsa, dan upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan juga mungkin kebhinnekaan yang sangat dibutuhkan saat ini, terutama di wilayah Papua Barat.

Triligo pusat pembelajaran ini-keluarga, sekolah, lingkungan sosial-menurut Widodo, perlu ditingkatkan peran serta fungsinya, mengingat bahwa, kebhinnekaan secara kultural ini ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi merupakan kekayaan Negara-bangsa yang sangat membanggakan, keragaman inilah yang menjadikan bangsa ini menjadi sangat indah, jika tetap dikelola dengan baik, termasuk internalisasi nilai-nilai keragaman kultural ini di semua lini, termasuk di institusi pendidikan. Sebaliknya, konflik dan disintegrasi, akan mudah juga disulut jika keragaman budaya ini tak ditangani dengan baik pula, terutama dengan menggunakan isu-isu terkait SARA yang terbukti sangat ampuh mendorong konflik yang lebih eskalatif. Meskipun disadari bahwa konflik sosial/komunal kerap kali dipicu oleh faktor kecemburuan sosial, dan ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi secara kualitatif berkenaan dengan pemahaman (kognitif) peserta didik Madrasah Aliyah di Kota Sorong, Papua Barat, beberapa aspek yang menjadi benang merah hasil riset ini adalah bahwa peserta didik yang menjadi informan penelitian ini memiliki pemahaman yang baik/memadai berkenaan dengan kebhinnekaan budaya di Tanah Air, secara spesifik di Kota Sorong, yang terepresentasi pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Peserta didik memahami keragaman suku/etnis yang ada di lingkungan mereka, bahkan dengan heterogenitas etnis tersebut, tak salah jika mereka mengklaim sebagai miniatur Indonesia, kalangan peserta didik memahami keragaman etnis tersebut, baik suku-suku pendatang, seperti Jawa, Bugis-Makassar, Minang, dan sebagainya, sebagian juga memahami beberapa etnis lokal, seperti etnis Moi, Kokoda, Ayamaru, dan seterusnya. Bahkan, di MAN dan MA Insan Kamil terdapat beberapa orang dari etnis Kokoda yang menjadi peserta didik di kedua satuan pendidikan ini.

Keragaman agama yang ada kota Sorong juga cukup dipahami peserta didik, mereka mampu menyebut semua agama yang dilayani Negara selama ini; Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Uniknya, peserta didik madrasah ini mampu menyebutkan beberapa denominasi Kristen dan katolik yang kini eksis di Kota Sorong, tampaknya, mereka mengenal denominasi melalui gereja-gereja kedua agama tersebut yang banyak bertebaran dalam kota dan juga di wilayah pinggiran kota.

Terkait ras, mereka setiap hari berhadapan dengan perbedaan ras tersebut, baik ras melaniesia yang melekat dalam diri orang Papua, dan ras Melayu-Asia, demikian ,mereka menyebutnya, yang melekat secara biologis dalam diri para migran. Selain pemahaman akan perbedaan ras.

Kebhinnekaan dari sisi antar golongan agama, saat ini di Kota Sorong beberapa aliran keagamaan yang terepresentasi melalui organisasi sosial keagamaan yang sejak dahulu telah eksis di Kota Sorong, baik ormas yang mainstream (arus utama), misalnya Nahdhatul Ulama, dan Muhammadiyah, maupun ormas yang muncul belakangan, misalnya salafi, LDII tapi tampaknya peserta didik lebih familiar dengan ormas keagamaan yang mainstream tadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hasil penelitian ini hadir di hadapan pembaca yang budiman tak lepas dari bantuan yang tulus dari beberapa pihak, apresiasi yang tinggi penulis tujukan kepada kedua pembimbing internal: Alm. Prof. Dr. H. Arifuddin Ismail, Prof. Dr. H. Hamdar Arraiyyah, kepada segenap informan. Ucapan terima kasih kepada H. Sapriillah, M.si, Kepala Balitbang Agama Makassar yang telah melibatkan penulis dalam kegiatan penelitian ini. Last but not least, penulis haturkan apresiasi terhadap segenap informan yang dengan tulus membagi data berkenaan dengan wawasan kebhinnekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2010. Berpihak Pada Manusia: Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 2009. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badan Pusat Statistik, Provinsi Papua Barat dalam Angka 2019
- Badan Pusat Statistik, Kota Sorong, Kota Sorong dalam Angka 2019
- Bloom, Benjamin. S (ed). 1956. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, London: Longmas Green & Co. Ltd.
- Burtonwood, Neil. 2002. Cultural Diversity, Liberal Pluralism and

- School: Isiah Berlin and Education, New York: Routledge.
- Creswell, John W, 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California: SAGE Publications.
- Daymon, Christine, et.al, 2002. *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*, London: Routledge.
- Funivall, J.S. 2010. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, New York: Cambridge University.
- Hardiman, Budi, 2002. *Belajar dari Politik Multikulturalisme, prolog dalam Will Kymlicka: Kewargaan Multikultural (terj) Indonesia: Pustaka LP3ES.*
- Hefner, Robert W. 2001. *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, USA: University of Hawai's Press.
- Kementerian Agama Kota Sorong, 2020, *Data Madrasah dan Penganut Agama*
- Kivimaki, Timo, 2006. *Initiating a Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and Role of the International Community*, Washington: The East-West Center.
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kymlicka, Will. 2002. *Multicultural Citizenship*, diterj Budi Hardiman: *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES.
- Malak, Stepanhus, 2016. *Papua dalam Kancan Nasional dan Internasional*, Bandung: Bejana.
- Moore, Kenneth D. 2014. *Effective Instructional Strategies: From Theory to Practice*, USA: SAGE Publication.
- Pekey, Frans. 2018. *Otonomi Khusus Papua: Dinamika Formulasi Kebijakan Yang Semu*, Jakarta: Buku Kompas.
- Samavor, Larry, et.al, 2012. *Intercultural Communication: A Reader*, USA: Wadsworth Cengage.
- Sen, Amartya, 2006. *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*, London: W. W. Norton and Company.
- Taylor, Shelly, et.al. 2009. *Social Psychology*, diterjemahkan Tri Wibowo: *Psikologi Sosial, Edisi Ke-12*, Jakarta: Kencana.